

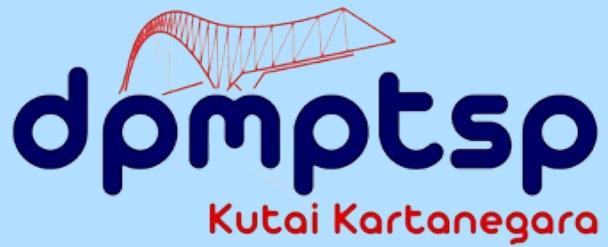


DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025


dpmptsp
Kutai Kartanegara



**KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI
KARTANEGERA GEDUNG D LANTAI DASAR
JALAN : WOLTER MONGONIDI TENGGARONG
KODE POS 75511**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat **Allah Subhanahu Wata’ala** atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disusun dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan *Renja Perubahan Tahun 2025* dilaksanakan berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta menindaklanjuti arahan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025** tentang Penajaman Prioritas Pembangunan Nasional dan Penguatan Efisiensi Belanja Daerah. Dokumen ini menjadi respon adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, khususnya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 50%, yang menuntut setiap perangkat daerah melakukan penyesuaian dan refocusing kegiatan secara terukur, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*).

Melalui dokumen *Renja Perubahan Tahun 2025* ini, DPMPTSP berupaya menegaskan peran strategisnya dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026**, yaitu mewujudkan masyarakat yang *sejahtera dan berbahagia* melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berdaya saing investasi tinggi. Penyesuaian rencana kerja ini menitikberatkan pada sinergi antara peningkatan iklim investasi, transformasi digital pelayanan publik, dan penguatan kelembagaan perizinan untuk menjawab dinamika pembangunan ekonomi daerah yang terus berkembang.

Proses penyusunan *Renja Perubahan Tahun 2025* ini dilaksanakan secara **partisipatif, transparan, dan akuntabel**, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, sektor swasta, dunia usaha, maupun masyarakat. Evaluasi capaian kinerja hingga triwulan ketiga menunjukkan rata-rata realisasi fisik sebesar **53,31%** dan realisasi keuangan sebesar **56,99%**, yang menjadi dasar utama dalam melakukan rasionalisasi program serta perumusan strategi korektif agar target tahunan tetap tercapai secara realistik. Fokus perbaikan diarahkan pada kegiatan strategis seperti penyusunan *Peta Potensi Investasi Daerah* berbasis *Investment Project Ready to Offer (IPRO)*, peningkatan layanan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penguatan sistem informasi investasi daerah.

DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara menyadari bahwa dinamika kebijakan nasional, kondisi fiskal, serta tantangan global yang dihadapi

memerlukan kemampuan adaptasi dan inovasi yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, melalui dokumen *Renja Perubahan Tahun 2025* ini, DPMPTSP berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, dan memperluas kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pelayanan investasi yang transparan, cepat, dan berintegritas.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui saran, data, maupun dukungan teknis di setiap tahapan perencanaan. Semoga *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025* ini dapat menjadi acuan yang efektif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Tenggarong, Agustus 2025
Kepala,

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu



Alfian Noor, SE.,M.Ling.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690113 199305 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT TAHUN BERJALAN	7
2.1. Evaluasi Capaian target program dan kegiatan sampai dengan triwulan terakhir sebelum perubahan.....	7
2.2. Permsalahan/hambatan yang dihadapai.....	31
2.3. Perbandingan antara rencana awal dengan realisasi dan Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi	34
Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUBAH	38

3.1.	Perubahan target tujuan dan sasaran Renstra PD.....	38
3.2.	Kesesuaian dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah	42
3.3	Rincian program/kegiatan yang diubah (tambah, kurangi, refocusing)	45
3.4	Keterkaitan program dan kegiatan dengan isu Strategis	65
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....		68
4.1.	Program dan Kegiatan	68
4.2	Perubahan Prioritas dan Matriks Program/Kegiatan...	70
4.3	Rencana Kebutuhan dan Sumber Pendanaan.....	73
4.4	Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Rasionalisasi Anggaran	75
4.5	Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Perubahan	77
Bab V. PENUTUP		103
LAMPIRAN.....		vii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi terhadap hasil RKPD DPMPTSP Kutai Kartanegara....	11
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP	39
Tabel 3.2 Target DPMPTSP	40
Tabel 3.3 Matriks Hasil Verifikasi Pelaksanaan RKPD Caturwulan III Dan Usulan Perubahan RKPD	47
Tabel 4.1 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2025.....	80
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun berjalan merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renja Perubahan ini disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika kebijakan nasional maupun kondisi fiskal yang berkembang. Dalam konteks tahun 2025, penyusunan Renja Perubahan menjadi sangat penting sebagai bentuk respons terhadap terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan penyesuaian prioritas pembangunan nasional dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas, serta penguatan belanja yang produktif.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memberikan arahan strategis agar pemerintah daerah melakukan refocusing program dan kegiatan, terutama pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi. Hal ini menuntut pemerintah daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk menyesuaikan perencanaan kerja agar selaras dengan kebijakan prioritas nasional. Oleh karena itu, dokumen Renja Perubahan diperlukan sebagai instrumen perencanaan yang adaptif terhadap perubahan arah kebijakan pusat, sekaligus menjaga keterpaduan antara RPJMD daerah dengan program pembangunan nasional.

Selain adanya arahan kebijakan baru dari pemerintah pusat, faktor fiskal juga menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Renja Perubahan tahun 2025. Pemerintah pusat telah melakukan penyesuaian transfer daerah, di mana Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pengurangan sebesar 50 persen dari alokasi sebelumnya. Penurunan

signifikan ini memberikan dampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam membiayai program prioritas dan pelayanan publik. Dengan kondisi tersebut, perangkat daerah dituntut untuk melakukan rasionalisasi, penajaman prioritas, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Pengurangan transfer daerah secara substansial memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menetapkan kegiatan yang dapat dijalankan. Program dan kegiatan yang bersifat mendesak, strategis, dan berdampak langsung pada masyarakat harus tetap dipertahankan, sementara kegiatan yang kurang prioritas perlu ditunda atau disesuaikan. Dalam kerangka ini, penyusunan Renja Perubahan bukan hanya merupakan penyesuaian administratif, tetapi juga bagian dari strategi manajerial pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan tahun 2025 menjadi instrumen penting dalam merespons dinamika kebijakan nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta kondisi fiskal daerah akibat pengurangan transfer pusat. Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan yang realistik, terukur, dan tetap menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD yang telah ditetapkan. Melalui dokumen ini, Perangkat Daerah dapat memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap berjalan pada jalur prioritas meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap optimal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang- undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

- Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 Tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam penyesuaian program, kegiatan, dan sub-kegiatan agar tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta kemampuan fiskal daerah. Renja Perubahan ini disusun untuk mengakomodasi arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai penajaman prioritas pembangunan serta kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan transfer daerah menjadi 50 persen. Dengan adanya Renja Perubahan, DPMPTSP memiliki acuan yang lebih adaptif, responsif, dan realistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

b. Tujuan

1. Menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, khususnya dalam mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan DPMPTSP agar sesuai dengan kondisi keterbatasan fiskal akibat pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat.
3. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah melalui penyelarasan Renja Perubahan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra DPMPTSP Tahun 2021–2026.

4. Menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan penganggaran tahun berjalan sehingga tetap terukur, efisien, efektif, serta berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.
5. Mendorong terciptanya tata kelola pelayanan perizinan dan investasi yang adaptif, transparan, serta mendukung iklim usaha yang kondusif meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN BERJALAN

Bab ini menguraikan Evaluasi capaian target program dan kegiatan sampai dengan triwulan terakhir sebelum perubahan, Permasalahan/hambatan yang dihadapi, Perbandingan antara rencana awal dengan realisasi dan Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUBAH

Bab ini menguraikan perubahan target tujuan dan sasaran Renstra PD, Kesesuaian dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah, Rincian program/kegiatan yang diubah (tambah, kurangi, refocusing) dan keterkaitan program dan kegiatan dengan isu strategis.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan penjabaran per program dan kegiatan (beserta indikator kinerja, target, dan lokasi), Perubahan prioritas kegiatan, Matriks program dan kegiatan perubahan, Rencana

kebutuhan anggaran perubahan, Sumber pendanaan, Analisis efisiensi, efektivitas, dan rasionalisasi anggaran dan perbandingan pagu awal dengan pagu perubahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi capaian target program dan kegiatan sampai dengan triwulan terakhir sebelum perubahan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan triwulan terakhir sebelum perubahan tahun 2025 menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata **capaian fisik mencapai 53,31%**, sedangkan **realisasi keuangan mencapai 56,99%** dari total target tahunan. Meskipun belum mencapai 70% sebagai batas ideal pelaksanaan triwulan III, capaian ini tetap menunjukkan adanya progres pelaksanaan yang stabil di tengah dinamika perubahan kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran daerah.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal masih menjadi prioritas utama DPMPTSP dengan kontribusi terbesar terhadap kinerja pembangunan daerah. Hingga triwulan III tahun 2025, nilai investasi yang terealisasi mencapai lebih dari separuh target tahunan, menunjukkan adanya tren positif meskipun terjadi perlambatan akibat pengaruh eksternal dan penyesuaian kegiatan promosi. Optimalisasi layanan investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi berbasis digital masih menjadi strategi efektif untuk menjaga minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk **Program Pelayanan Penanaman Modal**, capaian kinerja menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan program lainnya. Penyelesaian izin usaha dan layanan perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA mencapai sekitar 65% dari total target layanan, sementara kegiatan *jemput bola* dan layanan di *Mal Pelayanan Publik Kukar* berkontribusi terhadap percepatan proses perizinan

masyarakat. Kendati demikian, keterbatasan sumber daya manusia teknis dan kebutuhan penguatan sistem digital masih menjadi faktor yang menghambat percepatan layanan secara optimal.

Pada **sub kegiatan administarsi kepagawaian perangkat daerah**, capaian pelaksanaan kegiatan sudah mencapai target, dengan tingkat penyelesaian sekitar 100%. Kegiatan peningkatan kompetensi aparatur seperti pelatihan dan bimbingan teknis mengalami penundaan akibat adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dan refocusing kegiatan prioritas. Namun, beberapa kegiatan internal seperti *coaching clinic* dan pendampingan lintas bidang tetap dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan kinerja organisasi di tengah keterbatasan sumber daya.

Dari sisi keuangan, realisasi sebesar **56,99%** mencerminkan pelaksanaan anggaran yang relatif hati-hati. Penurunan transfer daerah sebesar 50% akibat kebijakan nasional memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan pembiayaan kegiatan, terutama untuk kegiatan promosi investasi dan pengadaan sarana pendukung. Meskipun demikian, DPMPTSP berhasil melakukan efisiensi pada pos belanja operasional dan mengutamakan kegiatan dengan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan penanaman modal daerah.

Secara sektoral, capaian kinerja penanaman modal menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah izin usaha baru serta bertambahnya realisasi investasi di sektor pertanian, energi terbarukan, dan industri pengolahan. Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dengan kontribusi lebih dari 70% dari total realisasi investasi daerah, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan tren stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap Kutai Kartanegara yang tetap terjaga.

Sektor **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** juga menunjukkan peran penting dalam capaian kinerja DPMPTSP. Melalui pendampingan perizinan dan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), tercatat lebih dari 1.000 pelaku usaha telah memperoleh legalitas usaha hingga triwulan III. Program *Kredit Kukar Idaman Terbaik* dan kemitraan antarusaha lokal turut memperkuat peran DPMPTSP dalam menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Beberapa kegiatan mengalami hambatan pelaksanaan, khususnya yang bersifat lintas sektor seperti forum investasi, kegiatan promosi di luar daerah, dan pengembangan sistem informasi investasi terintegrasi. Faktor penghambat utama antara lain keterbatasan anggaran, keterlambatan proses administrasi pengadaan, serta perubahan jadwal akibat penyesuaian prioritas daerah. DPMPTSP telah menindaklanjuti hal ini dengan langkah korektif berupa pergeseran kegiatan ke semester II serta optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah.

Dari sisi tata kelola, pelaksanaan prinsip **Good Governance** terus diperkuat melalui penerapan sistem pelaporan kinerja berbasis digital dan transparansi publik. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik. Hasil survei internal menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan menilai aspek kecepatan dan kemudahan akses sebagai faktor utama yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan capaian rata-rata **fisik 53,31% dan keuangan 56,99%**, maka kinerja DPMPTSP hingga triwulan terakhir sebelum perubahan dapat dikategorikan **cukup baik namun memerlukan percepatan di semester II**. Evaluasi ini menegaskan perlunya optimalisasi kegiatan strategis, efisiensi anggaran, serta penguatan inovasi digital untuk memastikan target tahunan dapat tercapai secara

optimal. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi penyesuaian *Renja Perubahan Tahun 2025* agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, RPJMD 2021–2026, dan strategi nasional peningkatan investasi.

Adapun capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini;

Tabel 2.1
Evaluasi terhadap hasil RKPD DPMPTSP
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja RENSTRA Tahun 2026. (akhir periode RPJMD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD DPMPTSP Tahun 2025 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENSTRA yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA DPMPTSP s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025 (%)	Penanggung Jawab												
											I	II	III	IV																
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6*100	16												
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	2	18	01				Penanaman Modal	Pertumbuhan Investasi	1,78	93.221.068.999	10,84	82.197.697.571	10,9	22.859.898.34		2.909.274.689	4.357.111.481	5.761.072.010	-	13.027.458.180	10,84	95.225.155.751	608,99	102,15	Kepala DPMPTSP				
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	2	18	01				Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	36,4	86.471.280.999	46,14	69.769.711.362	7,4	20.599.872.373	5,17	2.909.274.689	3,43	4.226.781.992	5.520.903.384	-	8,6	12.656.960.065	54,74	82.426.671.427	150,38	95,32	Urusan Penanaman Modal		
		2	18	01	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	88	74.130.342.046	74,13	58.902.013.609	77,4	17.164.528.600		2.909.274.689	3,973.504.676	78,54	4.874.037.244	-	78,5	1175.6816.609	78,5	70.658.830.218	89,20	95,32	Sekretaris		
		2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	60	1.125.000.000	42	1.634.381.323	15	565.569.593	5	-	6	139.067.922	7	184.694.214	0	-	18	323.762.136.00	60	1.958.143.459	100,00	174,06	Kasubag Program dan Keuangan/Subkoordinator Program

Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah																			dan Keuangan/K etua Tim Kerja Program dan Keuangan											
	2	18	01	2	01	0 0 0 1	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	325.000 .000	10	610.640. 000	4	262.88 1.393	1	-	2	57.137 0.000,0 0	1	75.968 .550	0	-	4	133.1 05.55 0,00	14	743.74 5.550	140, 00	228 ,84	PPTK
	2	18	01	2	01	0 0 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	5	125.000 .000	6	80.919.8 00	4	26.044. 000	2	-	2	6.826. 000,00	0	16.162 .000	0	-	4	22.98 8.000 ,00	10	103.90 7.800	200, 00	83, 13	PPTK	
	2	18	01	2	01	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	675.000 .000	12	942.821. 523	3	26.846. 000	1	-	1	7.160. 000,00	1	7.249. 000		-	3	14.40 9.000 ,00	15	957.23 0.523	250, 00	141 ,81	PPTK	
	2	18	01	2	01	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	1	0	1	76.082. 000	0	-	0	7.596. 336,00	0	64.856 .664	0	-	0	72.45 3.000 ,00	1	72.453. 000	0,00	0,0 0	PPTK	

		2	18	01	2	01	0 0 8	Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleng garaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	1	0	1	25.797. 000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0,00	0,0 0	PPTK		
		2	18	01	2	01	0 0 9	Pelaksanaan Pengumpula n Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulk an dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	1	0	1	116.45 8.000	0	-	0	60.348 .586,0 0	0	20.458 .000	0	-	0	80.80 6.586 ,00	1	80.806. 586	0,00	0,0 0	PPTK
		2	18	01	2	01	0 0 1 0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarka n Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	0	0	1	0	1	31.461. 200	1	-	0	-	1	-	-	2	-	3	-	0,00	0,0 0	PPTK	
		2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administasi Keuangan	100	58.458. 232.879	100	42.720.5 23.119	10 0	11.043. 724.63 4	20	2.558. 548.01 6	30	2.846. 606.70 2	20	2.538. 516.17 5		-	70	7.943 .670. 893,0 0	170	50.664. 194.01 2	170, 00	86, 67	Kasubag Program dan Keuangan/S ubkoordinat or Program dan Keuangan/K etua Tim Kerja Program

		2	18	01	2	02	0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwanulan/S emesteran SKPD	15	1.425.0 00.000	9	1.046.21 3.000	3	361.66 6.830	3	-	3	98.155 .000	3	53.627 .750	0	-	9	151.7 82.75 0,00	18	1.197.9 95.750	120, 00	84, 07	PPTK
		2	18	01	2	02	0 0 0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	150.000 .000	3	101.740. 000	1	11.940. 000	0	-	1	-	0	6.060. 000	0	-	1	6.060 .000, 00	4	107.80 0.000	80,0 0	71, 87	PPTK
		2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan BMD	15	191.995 .800	9	191.995. 800	20	204.21 1.310	7	8.720. 868	5	48.822 .000	6	17.410 .868	0	-	18	74.95 3.736 .00	27	266.94 9.536	180, 00	139 .04	Kasubag Umum dan Tata Laksana
		2	18	01	2	03	0 0 0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	59.996. 000	3	59.996.0 00	2	14.846. 850									-	3	59.996. 000	60,0 0	100 .00	PPTK	
		2	18	01	2	03	0 0 0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1	22.922. 080	1	8.720. 868						1	8.720 .868, 00	1	8.720.8 68	0,00	0,0 0	PPTK	

		2	18	01	2	03	0 0 0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	131.999 .800	6	131.999. 800	4	16.138. 260	1		1		1			3	-	9	131.99 9.800	90,0 0	100 ,00	PPTK	
		2	18	01	2	03	0 0 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	12	145.66 8.120	4	-	4	48.822 .000	4	17410 868		12	66.23 2.868 ,00	12	66.232. 868	0,00	0,0 0	PPTK	
		2	18	01	2	03	0 0 0 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				-	1	4.636.0 00											-	0,00	0,0 0	PPTK	
		2	18	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	0	-	0	-	2	13.201. 340	1	-	0	6.876. 000	0	-	0	-	1	6.876 .000, 00	1	6.876.0 00	0,00	0,0 0	Kasubag Program dan Keuangan/S ubkoordinator Program dan Keuangan/K etua Tim Kerja Program dan Keuangan
		2	18	01	2	04	0 0 0 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	-	0	-	1	6.876.0 00	1	0	0	6.876. 000	0	-	0	1	6.876 .000	1		0,00	0,0 0	PPTK	
		2	18	01	2	04	0 0 0 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	-	0	-	12	6.325.3 40	3		3	0	3	0		9	-	9	-	0,00	0,0 0	PPTK	

		2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Persentase kepegawai an	100	1.406.349.500	100	1.406.349.500	100	252.968.760	20	-	30	39.624.000	20	85.770.000	30	-	100	125.394.000	200	1.531.743.500	200	200,00	108,92	Kasubag Program dan Keuangan/Subkoordinator Program dan Keuangan/Ketua Tim Kerja Kepegawaian
		2	18	01	2	05	00002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	381.000.000	254	381.000.000										0	-	254	381.000.000	84,67	100,00	PPTK		
		2	18	01	2	05	00005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	100.000.000	3	100.000.000	4	55.701.380	1		1	3.014.000,00	1	24.930.000			3	27.944.000	6	127.944.000	120,00	127,94	PPTK	
		2	18	01	2	05	00009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75	205.044.000	75	205.044.000	15	54.185.380			15	2.810.000,00		16.080.000			15	18.890.000	90	223.934.000	120,00	109,21	PPTK	
		2	18	01	2	05	00111	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	250	720.305.500	200	720.305.500	75	143.082.000			35	33.800.000,00	40	44.760.000			75	78.560.000	275	798.865.500	110,00	110,91	PPTK	

		2	18	01	2	06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum	100	5.439.0 32.875	100	5.439.03 2.875	10 0	1.173.7 96.694	20	0	30	259.73 0.733	20	736.75 6.671	30	0	100	996.4 87.40 4	200	6.435.5 20.279	200, 00	118 ,32	Kasubag Umum dan tata Laksana
		2	18	01	2	06	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	636.560 .000	30	636.560.0 00	5	300.00 0.000			1	5.640. 000	4	276.78 3.715			5	282.4 23.71 5	35	918.98 3.715	100, 00	144 ,37	PPTK
		2	18	01	2	06	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	735.736 .145	20	735.736.1 45	5	293.07 9.772			3	147.46 3.700	2	109.39 8.000			5	256.8 61.70 0	25	992.59 7.845	100, 00	134 ,91	PPTK
		2	18	01	2	06	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22	400.000 .000	20	400.000.0 00	2	250.00 0.000					2	23.233 0200			2	232.3 30.20 0	22	632.33 0.200	100, 00	158 ,08	PPTK
		2	18	01	2	06	0 0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	500	105.000 .000	500	105.000.0 00	12	20.000. 000	3		3	7.247. 500	3	5.557. 500			9	12.80 5.000	509	117.80 5.000	101, 80	112 ,20	PPTK
		2	18	01	2	06	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	2.900.0 44.290	200	2.900.044 .290	12	231.09 0.572	3		3	99.379 .533	3	70.267 .256			9	169.6 46.78 9	209	3.069.6 91.079	104, 50	105 ,85	PPTK

		2	18	01	2	06	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	503.952 .400	500	503.952,4 00	50 0	42.420. 000					500	42.420 .000			500	42.42 0.000	1000	546.37 2.400	200, 00	108 ,42	PPTK
		2	18	01	2	06	0 0 1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24	157.740 .040	24	157.740,0 40	12	37.206. 350									0	-	24	157.74 0.040	100, 00	100 ,00	PPTK
		2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50	1.510,9 18.692	45	1.510,91 8.692	20	299.10 1.000	0	0	5	42.833 .300	15	174.79 6.600			20	217.6 29.90 0	65	1.728,5 48.592	130, 00	114 ,40	Kasubag Umum dan tata Laksana
		2	18	01	2	07	0 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	1.510,9 18.692	45	1.510,91 8.692,00	20	299.10 1.000			5	42.833 .300	15	174.79 6.600			20	217.6 29.90 0	65	1.728,5 48.592	130, 00	114 ,40	PPTK
		2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa	100	4.707,4 12.300	100	4.707,41 2.300	10 0	2.490,6 25.269	20	342,00 5.805	30	492,60 1.039	20	353,36 8.716	0	-	70	1.187 975. 560	170	5.895,3 87.860	170, 00	125 ,24	Kasubag Umum dan tata Laksana
		2	18	01	2	08	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500	51.990. 000	2500	51.990,0 00	2	3.000,0 00								0	-	2500	51.990. 000	100, 00	100 ,00	PPTK	
		2	18	01	2	08	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	658.466 .272	36	658.466. 272	12	266.76 6.216	3		3	37.095 .686	3	55.014 .314			9	92.11 0.000	45	750.57 6.272	75,0 0	113 ,99	PPTK

	2	18	01	2	08	00003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	537.920 .000	38	537.920.000	24	132.99 0.000	6		6	39.110 .000		18	39.11 0.000	56	577.03 0.000	112,00	107 ,27	PPTK			
	2	18	01	2	08	00004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	245	3.459.0 36.028	152	3.459.03 6.028	12	2.087.8 69.053	3	342.00 5.805	3	455.50 5.353	3	259.24 4.402, 00		9	1.056 .755. 560	161	4.515.7 91.588	65,7 1	130 ,55	PPTK	
	2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	108	1.291.4 00.000	108	1.291.40 0.000	22 7	1.121.3 30.000	0	-	63	97.342 .980	46	782.72 4.000		-	109	880.0 66.98 0	217	2.171.4 66.980	200, 93	168 ,15	Kasubag Umum dan tata Laksana
	2	18	01	2	09	00001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	1.054.4 80.000	48	1.054.48 0.000	14 4	495.64 0.000			23	72.943 .980	23	231.67 5.000			46	304.6 18.98 0	94	1.359.0 98.980	195, 83	128 ,89	PPTK

		2	18	01	2	09	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	236.920 .000	60	236.920. 000	80	79.680. 000			40	24.399 .000	20	5.150. 000			60	29.54 9.000	120	266.46 9.000	200, 00	112 ,47	PPTK		
		2	18	01	2	09	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					3	546.01 0.000					3	545.89 9.000			3	545.89 9.000	0,00	0,0 0	PPTK				
		2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PM A	3267	4.950.0 00.000	8624	3.476.75 8.800	44 48	1.717.2 81.800	1.103	-	2.557	66.595 .241			70.106 .871		-	3660	136.7 02.11 2	12284	3.613.4 60.912	376, 00	73, 00	Ahli Madya Selaku Ketua Tim Kerja Program Iklim Penanaman Modal	
		2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/In sentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	9	700.000 .000	8	700.000. 000	1	240.86 1.000		-			66.595 .241			70.106 .871		-	0	136.7 02.11 2	8	836.70 2.112	88,8 9	119 ,53	Ahli Madya Selaku Ketua Tim Kerja Program Iklim Penanaman Modal
		2	18	02	2	01	0 0 0 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	700.000 .000	1	700.000. 000,00											0	-	1	700.00 0.000	100, 00	100 ,00	PPTK		

		2	18	02	2	01	0 0 0 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 0	240.86 1.000			35	66.595 .241	35	70.106 .871,0 0			70	136.7 02.11 2	70	136.70 2.112	0,00	0,0 0	PPTK				
		2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah kajian Peta Potensi Investasi	14	4.250.0 00.000	11	2.776.75 8.800	4	1.476.4 20.800	0		0		0		0	15.08 7.945	11	2.791.8 46.745	78,5 7	65, 69	Ahli Madya Selaku Ketua Tim Kerja Program Iklim Penanaman Modal		
		2	18	02	2	02	0 0 0 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	3	1.750.0 00.000	2	700.000. 000	1	213.79 3.800						15.087 .945		0	15.08 7.945	2	715.08 7.945	66,6 7	40, 86	PPTK	
		2	18	02	2	02	0 0 0 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	11	2.500.0 00.000	9	2.076.75 8.800	3	1.262.6 27.000				75.692 .167		55.900 .552		0	131.5 92.71 9	9	2.208.3 51.519	81,8 2	88, 33	PPTK	
		2	18	03	2			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PM A	350	3.271.6 32.953	986	3.271.63 2.953	20 0	1.098.9 59.200	80	-	0	112.75 0.000	88	175.39 5.328		-	168	288.1 45.32 8	1154	3.559.7 78.281	329, 71	108 ,81	Ahli muda penata kelola penanaman modal selaku ketua tim kerja promosi penanaman modal

		2	18	03	2	01	Penyelengga raan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah kegiatan promosi industri/hil irisasi	35	3.271.6 32.953	27	3.271.63 2.953	8	1.098.9 59.200		-	2	112.75 0.000	3	175.39 5.328		-	5	234.0 45.01 0	32	3.505.6 77.963	91,4 3	107 ,15	Ahli muda penata kelola penanaman modal selaku ketua tim kerja promosi penanaman modal	
		2	18	03	2	01	0 0 0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanama n Modal Kabupaten /Kota	20	2.671.6 32.953	14	600.000. 000	6	700.59 1.400			2	112.75 0.000	2	121.29 5.010			4	234.0 45.01 0	18	834.04 5.010	90,0 0	31, 22	PPTK
		2	18	03	2	01	0 0 0 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanama n Modal Kab/Kota	15	600.000 .000	13	2.671.63 2.953	2	398.36 7.800					1	54.100 .318			1	54.10 0.318	14	2.725.7 33.271	93,3 3	454 ,29	PPTK
		2	18	05	2		PROGRAM PENGENDALI AN PELAKSANA AN PENANAMA N MODAL	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	2,18	4.119.3 06.000	11,58	4.119.30 6.000	10, 9	619.10 2.773	-68,5	-	-47,6	73.932 .075		401.36 3.941		-	-47,6	475.2 96.01 6	-47,6	4.594.6 02.016	- 218 3,49	111 ,54	Ahli muda penata kelola penanaman modal selaku ketua tim kerja Pengendali an pelaksanaa n penanaman modal	
		2	18	05	2	01	Pengendali an Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah pengendali an PMA / PMDN	1500	4.119.3 06.000	900	4.119.30 6.000	10 20	619.10 2.773	13	-	110	73.932 .075	160	401.36 3.941	-	-	283	475.2 96.01 6	1183	4.594.6 02.016	78,8 7	111 ,54	Ahli muda penata kelola penanaman modal selaku ketua tim kerja Pengendali an pelaksanaa	

																			n penanaman modal								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA/ PMDN yang dilakukan Pemantauan	740	810.000 .000	740	810.000 .000							0	-	740	810.00 0.000	100, 00	100 ,00	PPTK			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA/ PMDN yang dilakukan Pembinaan	1000	1.329.1 93.000	1000	1.329.19 3.000							0	-	1000	1.329.1 93.000	100, 00	100 ,00	PPTK			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA/PMD N yang dilakukan Pengawasan	500	1.980.1 13.000	500	1.980.11 3.000							0	-	500	1.980.1 13.000	100, 00	100 ,00	PPTK			
	2	18	05	2	01	0 0 0 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					10 0	90.847. 800	3		8	12.340 .000	8	66.232 .469		19	78.57 2.469	19	78.572. 469	0,00	0,0 0	PPTK

		2	18	05	2	01	0 0 0 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementa si Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasa n Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				40 0	348.25 6.200			84	13.351 .808	140	264.24 3.150			224	277.5 94.95 8	224	277.59 4.958	0,00	0,0 0	PPTK	
		2	18	05	2	01	0 0 0 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaa n Perizinan Berusaha				10 0	179.99 8.773	10		18	48.240 .267	12	70.888 .322			40	119.1 28.58 9	40	119.12 8.589	0,00	0,0 0	PPTK	
2	Meningkat an Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	2	18	04				Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,73	6.749.7 88.000	92,91	12.427,9 86.209	89, 52	2.260.0 25.975	96,32	-	90,63	130.32 9.489	98,02	240.16 8.626		-	98,0 2	370.4 98.11 5	98,02	12.798. 484.32 4	106, 86	189 ,61	Urusan Perizinan

		2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	5700	3.449.7 88.000	32715	2.999.78 8.000	12 50 0	846.64 3.775	500	-	500	130.32 9.489	330	201.41 1.567		-	1330	331.7 41.05 6	34045	3.331.5 29.056	597, 28	96, 57	Ahli Muda PTSP selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Penanaman Modal	
		2	18	04	2	01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	91,73	3.449.7 88.000	92,91	2.999.78 8.000	89, 52	846.64 3.775	96,32	-	90,63	130.32 9.489	98,02	201.41 1.567		-	98,0 2	331.7 41.05 6	98,02	3.331.5 29.056	106, 86	96, 57	Ahli Muda PTSP selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Penanaman Modal	
		2	18	04	2	01	0 0 0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten /Kota	200	700.000 .000	70	250.000. 000,00										0	0	70	250.00 0.000	35,0 0	35, 71	PPTK	
		2	18	04	2	01	0 0 0 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2500	950.000 .000	2540	950.000. 000	12 00	230.62 7.550	500		500	49.968 .000	330	69.117 .072			1330	1190 8507 2	3870	1.069.0 85.072	154, 80	112 ,54	PPTK

	2	18	04	2	01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Terintegras i secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegras i secara Elektronik.	500	699.788 .000	240	699.788. 000	100	355.26 8.425			100	23.982 .696		100	2398 2696	340	723.77 0.696	68,0 0	103 ,43	PPTK		
	2	18	04	2	01	0008	Pemantauan , analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantau an, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten /Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500	1.100.0 00.000	2540	1.100.00 0.000	650	260.74 7.800	500		500	80.361 .489		330	108.31 1.799		1330	1886 7328 8	3870	1.288.6 73.288	154, 80	117 ,15	PPTK

		2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah aplikasi	15	3.300.000.000	15	9.428.198.209	3	1.413.382.200	2		2	83.872 .901	3	38.757 .059			98,0 2	122.6 29.96 0	113,02	9.550,8 28.169	753, 47	289 ,42	Ahli Muda PTSP selaku Ketua Tim Kerja PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
		2	18	06	2	01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi	15	3.300.000.000	15	9.428.198.209	3	1.413.382.200	2		2	83.872 .901	3	38.757 .059			7	122.6 29.96 0	12	9.550,8 28.169	15	289 ,42	Ahli Muda PTSP selaku Ketua Tim Kerja PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
		2	18	06	2	01	00002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dilah, Dikaji dan Dimanfaatkan	50	3.300.000.000	30	9.428.198.209	10	1.413.382.200	2		2	83.872 .901	3	38.757 .059			7	122.6 29.96 0	37	9.550,8 28.169	74,0 0	289 ,42	Ahli Muda PTSP selaku Ketua Tim Kerja PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,75	1.454.637,345	47,03	2.178.555,741	98,02	2.880.536,005	0	0	53,31	6,51 3,72 9,09 0									
Predikat Kinerja																			D	D										
																			Kurang	Kurang										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan aparatur 2. Komitmen kepemimpinan yang berorientasi hasil (result-based management) 3. Penerapan sistem monitoring internal bulanan 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan (OSS-RBA dan SIPD) 5. Dukungan kebijakan pemerintah Daerah dan sinergi antar-PD di daerah.
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi dan ketidakpastian kondisi keuangan daerah 2. Beberapa subkegiatan strategis seperti promosi investasi, pelatihan SDM, dan pengembangan sistem digital pelayanan belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. 3. Ketidaksinkronan antara indikator kinerja Renstra dan Renja menyebabkan beberapa indikator capaian tidak dapat diukur secara penuh.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan percepatan perencanaan dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana 3. Mengoptimalkan koordinasi lintas perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal 4. Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi berbasis data (E-Monev) 5. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja (Performance Based Planning) 6. Memperkuat integrasi data antara Renstra, Renja, dan SIPD-RI 7. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan fasilitasi investasi daerah 8. Meningkatkan sinergi dengan masyarakat dan pelaku usaha lokal 9. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran 10. Menetapkan target korektif pada Triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi 11. Memperkuat pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja 12. Mengupayakan peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan kepuatan layanan publik 13. Menyiapkan rencana penguatan kelembagaan dan SDM tahun depan (Renja 2026)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

1. Penguatan Perencanaan dan Penyusunan Program Berbasis Kinerja
2. Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas di Awal Tahun
3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat
5. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Antar-PD
6. Peningkatan Promosi dan Fasilitasi Investasi Daerah
7. Pemerataan Pelaksanaan Program antar-Triwulan
8. Optimalisasi Anggaran dan Efisiensi Belanja
9. Penguatan Kerjasama Pemerintah dan Dunia Usaha (Public-Private Partnership)
10. Pengembangan Data dan Informasi Investasi Daerah
11. Penguatan Kerangka Kebijakan dan Regulasi Daerah
12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha Lokal
13. Peningkatan Integrasi Data Kinerja DPMPTSP dengan SAKIP, SIPD dan e-pantau

2.2 Permasalahan/hambatan yang dihadapi

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara hingga triwulan terakhir sebelum perubahan tahun 2025 menghadapi berbagai kendala yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, rata-rata capaian fisik baru mencapai 53,31%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 56,99%. Angka ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berjalan optimal akibat sejumlah faktor internal dan eksternal yang memengaruhi progres kegiatan serta serapan anggaran.

Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan **ketidaksesuaian antara jadwal pelaksanaan kegiatan dan waktu pencairan anggaran**. Beberapa kegiatan yang bersifat teknis dan memerlukan proses pengadaan mengalami keterlambatan akibat revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penyesuaian rencana kerja dengan kebijakan nasional. Selain itu, perubahan arah kebijakan fiskal pada pertengahan tahun, termasuk pengurangan transfer daerah hingga 50%, turut berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas dan menyebabkan perlunya refocusing anggaran.

Dari sisi administrasi keuangan, hambatan muncul dalam bentuk **proses penyesuaian pagu dan rasionalisasi belanja** yang memerlukan waktu tambahan dalam koordinasi antarbidang. Proses verifikasi administrasi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pelaporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), juga membutuhkan penyesuaian terhadap sistem baru. Hal

ini berdampak pada keterlambatan penyerapan keuangan terutama pada kegiatan-kegiatan yang menggunakan pola pembayaran termin atau kontraktual.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan **kapasitas dan jumlah SDM teknis** di bidang pelayanan investasi dan perizinan. Meskipun telah dilakukan upaya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur, realisasi kegiatan penguatan kelembagaan baru mencapai sekitar 50% akibat keterbatasan waktu dan anggaran. Selain itu, adanya rotasi pegawai dan beban kerja yang tinggi di unit pelayanan mengakibatkan beberapa kegiatan administrasi dan pelaporan mengalami keterlambatan.

Dari aspek digitalisasi layanan, penerapan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) masih menghadapi tantangan teknis terutama dalam integrasi data lintas instansi. Kendala jaringan internet di wilayah kecamatan dan keterbatasan perangkat penunjang menyebabkan pelayanan perizinan online belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berdampak pada waktu penyelesaian izin dan keterlambatan input data realisasi investasi di sistem nasional.

Permasalahan koordinasi lintas sektor juga menjadi salah satu hambatan utama. Beberapa kegiatan yang memerlukan **sinkronisasi lintas perangkat daerah**, seperti promosi investasi terpadu dan pengembangan kawasan ekonomi, belum dapat terlaksana secara efektif karena perbedaan prioritas dan jadwal antarinstansi. Kurangnya mekanisme koordinasi formal yang berkelanjutan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kolaboratif antar-PD.

Dari sisi kebijakan, perubahan kebijakan pusat melalui **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah** turut

memengaruhi pelaksanaan program investasi daerah. Penghematan belanja operasional dan pembatasan kegiatan perjalanan dinas berdampak pada tertundanya kegiatan promosi investasi luar daerah serta kegiatan fasilitasi pelaku usaha. Selain itu, perubahan regulasi OSS-RBA yang memerlukan penyesuaian teknis juga menunda beberapa proses pelayanan.

Secara geografis, cakupan wilayah pelayanan DPMPTSP yang luas juga menjadi tantangan tersendiri. Kegiatan *jemput bola* dan layanan perizinan keliling di kecamatan terpencil terkadang terkendala akses transportasi, cuaca, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Hambatan ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan berjalan lebih lambat dibandingkan rencana kerja awal, terutama untuk kegiatan non-rutin yang melibatkan banyak lokasi.

Permasalahan juga muncul dalam aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sistem pelaporan internal belum sepenuhnya terdigitalisasi dan masih dilakukan secara manual oleh semua bidang. Akibatnya, terjadi perbedaan data antara realisasi kegiatan dan data keuangan, yang berimplikasi pada keterlambatan penyusunan laporan kinerja. Evaluasi triwulan yang belum terintegrasi penuh juga mengurangi kecepatan pengambilan keputusan korektif.

Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut berdampak terhadap capaian kinerja yang baru mencapai **fisik 53,31% dan keuangan 56,99%**. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas SDM, percepatan proses pengadaan, optimalisasi koordinasi lintas bidang, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring kinerja. Selain itu, percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas pada semester II tahun 2025 menjadi

kunci agar target tahunan dapat tercapai dan kategori kinerja DPMPTSP dapat meningkat dari “Kurang” menjadi “Cukup” atau “Baik” pada akhir tahun anggaran.

2. 3. Perbandingan antara rencana awal dengan realisasi dan Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara hingga triwulan terakhir sebelum perubahan tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara rencana awal dan realisasi di lapangan. Berdasarkan data, capaian fisik baru mencapai **53,31%** dari target, sedangkan realisasi keuangan sebesar **56,99%**. Capaian ini masih di bawah target ideal triwulan III (75%), yang menunjukkan adanya kendala pelaksanaan baik dari sisi teknis, administratif, maupun kebijakan fiskal.

Pada tahap perencanaan awal, DPMPTSP menargetkan seluruh program dan kegiatan strategis dapat mencapai progres fisik minimal **75%** hingga triwulan ketiga. Namun, dalam pelaksanaannya, sebagian besar kegiatan belum dapat terealisasi sesuai jadwal. Beberapa kegiatan fisik seperti promosi investasi, pengembangan data investasi daerah, dan pembinaan pelaku usaha mengalami keterlambatan karena revisi jadwal serta proses pengadaan yang memerlukan waktu lebih panjang. Akibatnya, rata-rata capaian fisik hanya mencapai **53,31%** atau selisih sekitar **21,69%** dari target rencana awal.

Dari sisi keuangan, target penyerapan anggaran pada triwulan III direncanakan mencapai **75% dari pagu anggaran tahunan**, namun realisasi yang tercapai baru sebesar **56,99%**. Selisih sebesar **18,01%** disebabkan oleh efisiensi

belanja operasional, penundaan beberapa kegiatan fisik, dan adanya pembatasan transfer daerah dari pemerintah pusat. Meski demikian, tingkat realisasi keuangan yang lebih tinggi dibanding capaian fisik menunjukkan bahwa beberapa kegiatan non-fisik seperti administrasi perizinan dan pelayanan masyarakat telah berjalan relatif baik.

Jika ditinjau per program, **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dan **Program Pelayanan Penanaman Modal** merupakan dua program dengan tingkat capaian tertinggi, masing-masing mencapai sekitar **60–65%** dari target tahunan. Sebaliknya, pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terutama kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah masih di bawah **50%**, akibat tertundanya kegiatan pelatihan, pendampingan teknis, dan evaluasi kelembagaan yang dijadwalkan ulang pada perubahan anggaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berorientasi pelayanan langsung cenderung lebih cepat terealisasi dibandingkan kegiatan pengembangan internal.

Selisih antara rencana dan realisasi disebabkan oleh sejumlah faktor utama, antara lain penyesuaian jadwal kegiatan karena perubahan pagu anggaran, keterlambatan proses administrasi, dan efisiensi belanja pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan lintas sektor seperti forum investasi daerah dan kerja sama promosi luar daerah tertunda akibat pembatasan perjalanan dinas serta penghematan belanja modal. Hal ini menandakan bahwa dinamika kebijakan fiskal nasional berpengaruh langsung terhadap realisasi program daerah.

Faktor eksternal paling dominan yang memengaruhi pelaksanaan kinerja adalah **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penajaman Belanja Daerah** yang mengakibatkan pengurangan **transfer daerah hingga 50%**. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan refocusing dan rasionalisasi terhadap kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Selain itu, situasi ekonomi nasional yang masih berfluktuasi menyebabkan beberapa investor menunda realisasi penanaman modal, berdampak langsung pada capaian indikator investasi daerah.

Kondisi geografis wilayah Kutai Kartanegara yang luas juga menjadi faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pelayanan keliling dan promosi investasi di wilayah terpencil terkendala aksesibilitas, kondisi cuaca, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Selain itu, tren ekonomi global yang belum stabil, terutama di sektor energi dan pertambangan, memengaruhi minat investasi serta memperlambat proses realisasi investasi di beberapa sektor strategis.

Dari sisi internal, faktor yang paling memengaruhi adalah **keterbatasan kapasitas sumber daya manusia** serta **penyesuaian struktur organisasi** yang masih berlangsung. Beberapa bidang masih menghadapi kekurangan pegawai teknis dengan kompetensi spesifik, terutama dalam pengelolaan data investasi dan pelayanan berbasis OSS-RBA. Selain itu, beban kerja tinggi pada unit pelayanan menyebabkan beberapa kegiatan administrasi dan pelaporan mengalami keterlambatan, sehingga memengaruhi kecepatan penyelesaian kegiatan dan pelaporan capaian fisik.

Faktor internal lainnya adalah sistem koordinasi antar bidang dan antar perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal. Mekanisme pelaporan dan monitoring kinerja masih dilakukan secara manual di unit-unit, sehingga data realisasi tidak selalu terkonsolidasi secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan perbedaan data antara laporan realisasi keuangan dan fisik di tingkat bidang, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Keterbatasan infrastruktur digital juga memengaruhi integrasi data perizinan dan investasi.

Dengan mempertimbangkan perbandingan antara rencana dan realisasi, serta pengaruh faktor internal dan eksternal, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP hingga triwulan terakhir sebelum perubahan tahun 2025 **belum mencapai target optimal namun masih berada pada tren positif**. Capaian fisik 53,31% dan keuangan 56,99% menunjukkan kinerja yang tergolong **kategori “Kurang”**, namun masih dapat meningkat pada semester II melalui optimalisasi koordinasi, percepatan kegiatan strategis, serta penguatan kapasitas aparatur. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyesuaian dalam *Renja Perubahan 2025* untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik ke depan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUBAH

3.1 Perubahan target tujuan dan sasaran Renstra PD

Perubahan target tujuan dan sasaran dalam *Renstra* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 dilakukan sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis, kebijakan fiskal nasional, dan hasil evaluasi capaian kinerja hingga triwulan III tahun berjalan. Dengan capaian fisik sebesar **53,31%** dan keuangan sebesar **56,99%**, terlihat bahwa sebagian indikator kinerja sasaran belum menunjukkan tren pencapaian optimal. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian arah kebijakan dan target kinerja agar tetap realistik, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD 2021–2026.

Perubahan target dilakukan sebagai langkah rasionalisasi terhadap gap antara rencana awal dan realisasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengurangan transfer daerah hingga 50% berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penghematan tersebut berdampak pada keterbatasan pelaksanaan beberapa kegiatan utama, termasuk kegiatan promosi investasi dan pengembangan kelembagaan. Oleh karena itu, penyesuaian target dilakukan agar indikator tujuan dan sasaran dalam Renstra tetap relevan dengan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas pelaksanaan program DPMPTSP.

Dalam Renstra awal, tujuan utama DPMPTSP difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi daerah, tujuan tersebut disempurnakan menjadi “meningkatkan daya saing investasi daerah melalui transformasi pelayanan

perizinan dan digitalisasi layanan publik.” Perubahan ini menekankan bahwa pencapaian investasi bukan hanya bergantung pada nilai investasi masuk, tetapi juga pada efisiensi sistem pelayanan, kecepatan perizinan, dan kualitas kelembagaan investasi daerah.

Sasaran strategis yang semula menitik beratkan pada peningkatan nilai investasi dan jumlah investor diformulasikan ulang agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi dan kondisi fiskal. Dalam Renstra yang diperbarui, sasaran difokuskan pada tiga aspek utama: (1) meningkatnya realisasi investasi produktif berkelanjutan, (2) meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, dan (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan investasi daerah. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan sasaran tetap spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Adapun Tujuan dan Sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dari sisi indikator, perubahan Renstra menyesuaikan pada konteks *output* dan *outcome* yang realistik. Misalnya, indikator “Nilai Realisasi Investasi” yang semula ditargetkan tumbuh 30,47% per tahun, diturunkan menjadi 11,07% sesuai

proyeksi ekonomi makro. Indikator “Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)” disesuaikan dari 30,47% menjadi 2,18% akibat keterbatasan SDM dan penyesuaian sistem OSS-RBA nasional. Demikian pula, indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” tetap dipertahankan di atas 89,52 dengan penekanan pada kualitas, bukan kuantitas pelayanan. Adapun target sasaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada table 3.2.

Tabel 3.2

**TARGET DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	Target Renstra SKPD				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Insvestasi (PMDN/PMA) Triliun Rupiah	7	7,2	7,35	7,4	7,45
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,12	87,75	88,25	89,52	91,73

Sumber Data : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026

Penurunan capaian fisik dan keuangan hingga triwulan III menjadi salah satu dasar perubahan target sasaran. Rendahnya capaian 53,31% fisik dan 56,99% keuangan menunjukkan bahwa beberapa kegiatan belum berjalan sesuai tahapan Renstra awal. Oleh karena itu, revisi sasaran diarahkan agar target pada semester II lebih fokus pada kegiatan strategis dengan tingkat urgensi tinggi, seperti peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi layanan perizinan elektronik, dan intensifikasi promosi investasi berbasis potensi daerah.

Faktor internal yang melatar belakangi perubahan sasaran meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang belum merata

antar bidang, serta belum optimalnya sistem monitoring berbasis digital. Selain itu, terjadi rotasi pegawai di beberapa jabatan fungsional yang berdampak pada adaptasi kerja dan efisiensi pelaksanaan program. Faktor-faktor internal ini menyebabkan realisasi kegiatan strategis berjalan lambat, sehingga perubahan target sasaran menjadi langkah korektif yang realistik dan berbasis bukti.

Dari sisi eksternal, perubahan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran, fluktuasi ekonomi global, serta dinamika iklim investasi menjadi faktor dominan dalam penyesuaian sasaran Renstra. Selain itu, perubahan regulasi sistem OSS-RBA dan peralihan standar pelayanan publik nasional menuntut DPMPTSP untuk menyesuaikan strategi dan target pelayanan. Faktor geografis Kutai Kartanegara yang luas serta infrastruktur digital yang belum merata juga memperlambat pelaksanaan beberapa kegiatan lintas wilayah.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, DPMPTSP menetapkan arah kebijakan baru berupa penguatan digitalisasi layanan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta fokus pada investasi berkelanjutan (green dan blue investment). Pendekatan ini diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian sasaran Renstra yang telah disesuaikan, dengan indikator keberhasilan yang tidak hanya berorientasi pada output kegiatan, tetapi juga pada outcome berupa peningkatan kualitas layanan dan kepuasan publik.

Perubahan target tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan realitas kinerja dan tantangan lingkungan strategis. Penyesuaian ini memastikan agar Renstra tetap relevan, adaptif, dan mendukung pencapaian visi daerah yaitu terwujudnya

pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berdaya saing investasi tinggi. Dengan perubahan ini, DPMPTSP diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada periode perencanaan selanjutnya.

3.2 Kesesuaian dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari *Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP 2021–2026* yang merupakan turunan langsung dari *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026*. Dokumen ini menegaskan kesinambungan kebijakan pembangunan daerah dan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP selaras dengan arah, strategi, dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

DPMPTSP berperan langsung dalam mewujudkan visi Bupati Kutai Kartanegara yaitu “*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia*” melalui dua misi utama yang diembannya, yakni: (1) *Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani*; serta (2) *Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif*. Kedua misi ini diterjemahkan ke dalam strategi peningkatan daya saing investasi, reformasi pelayanan publik, serta optimalisasi kemudahan berusaha berbasis digitalisasi pelayanan

Keselarasan DPMPTSP dengan RPJMD diwujudkan melalui tujuan strategis yaitu *meningkatkan daya saing investasi daerah*, yang dijabarkan dalam dua sasaran utama: (1) meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN dan PMA; dan (2) meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal. Kedua sasaran ini merupakan indikator kunci pembangunan ekonomi daerah dan termasuk dalam indikator kinerja utama RPJMD 2021–2026 pada aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik berbasis investasi.

Dalam konteks prioritas pembangunan daerah, DPMPTSP mendukung *arah kebijakan ekonomi daerah* melalui pelaksanaan program-program unggulan seperti *Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data serta Sistem Informasi Penanaman Modal*. Kelima program ini dirancang untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi Kutai Kartanegara dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju investasi produktif yang berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan dan arah pembangunan, Renja DPMPTSP 2025 juga mendukung *prioritas pembangunan daerah tahun 2025* yang diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi hijau, peningkatan investasi hilirisasi, dan digitalisasi pelayanan publik. Melalui inovasi pelayanan seperti *Aplikasi Pelongseng, Inovasi PILOT (Pelayanan Izin On The Spot)*, dan penguatan *Mal Pelayanan Publik (MPP)*, DPMPTSP berperan dalam mempercepat realisasi visi RPJMD yang menekankan tata kelola pemerintahan modern dan pelayanan publik adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, kesesuaian dengan RPJMD juga tercermin dari kontribusi DPMPTSP terhadap *indikator makro pembangunan daerah*. Berdasarkan evaluasi tahun 2023, realisasi investasi di Kutai Kartanegara mencapai Rp14,80 triliun atau 204% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar Rp7,2 triliun. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas strategi penanaman modal dan menjadi bukti konkret kontribusi DPMPTSP terhadap pencapaian sasaran strategis daerah.

Dalam perspektif kelembagaan dan tata kelola, DPMPTSP berkomitmen terhadap prinsip *good governance* sebagaimana mandat RPJMD dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Seluruh program dan kegiatan Renja 2025 dirancang secara terukur dengan memperhatikan efisiensi anggaran, hasil (outcome) yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha, serta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Keterpaduan DPMPTSP dengan RPJMD juga terlihat dari dukungan terhadap *pembangunan wilayah dan pemerataan investasi*. Melalui kegiatan penyusunan *Peta Potensi Investasi Berstandar IPRO*, pengembangan data berbasis spasial, serta koordinasi lintas OPD dan sektor swasta, DPMPTSP berkontribusi pada pengembangan kawasan ekonomi potensial yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMD untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 merupakan bagian integral dari *prioritas pembangunan daerah Kutai Kartanegara* yang mencakup peningkatan daya saing ekonomi lokal, percepatan digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan iklim investasi yang transparan dan

berkelanjutan. Semua ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang melayani dan pembangunan ekonomi yang inklusif, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026 dan dioperasionalkan melalui RENJA DPMPTSP Tahun 2025.

3.3 Rincian program/kegiatan yang diubah (tambah, kurangi, refocusing)

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan beberapa penyesuaian program dan kegiatan sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik, kebijakan fiskal daerah, serta rekomendasi hasil evaluasi RKPD. Penyesuaian tersebut meliputi penambahan, pengurangan, dan refocusing kegiatan agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*outcome based budgeting*). Perubahan ini juga disesuaikan dengan arahan Bupati Kutai Kartanegara dalam memperkuat pelayanan berbasis digital dan peningkatan kualitas investasi daerah.

Beberapa kegiatan mengalami *pengurangan pagu anggaran* karena kebutuhan operasional yang meningkat dan penyesuaian pada hasil evaluasi audit internal. Di antaranya, terdapat pengurangan pagu pada kegiatan *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* yang meningkat dari 550.000.000 menjadi 546.510.000, dengan alasan Dilakukan untuk penyesuaian anggaran dengan kegiatan Selain itu, kegiatan *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* juga mengalami penurunan alokasi anggaran untuk menyesuaikan kinerja dengan anggaran yang tersedia.

Sebaliknya, terdapat pula beberapa kegiatan yang mengalami *pengurangan atau refocusing* anggaran. Salah satunya adalah kegiatan *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*, yang dikurangi atau bahkan dihapus karena kegiatan serupa telah diambil alih oleh Diskominfo sebagai penanggung jawab utama kegiatan PPID daerah. Selain itu, terdapat rasionalisasi kegiatan pendukung non-prioritas seperti jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disesuaikan dengan efisiensi kebutuhan operasional, tanpa mengurangi capaian kinerja pelayanan publik secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, perubahan dalam program dan kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 mencerminkan strategi pengelolaan anggaran yang adaptif dan responsif terhadap isu strategis kelembagaan, tuntutan digitalisasi pelayanan, serta peningkatan daya saing investasi daerah. Refocusing diarahkan untuk memperkuat perencanaan berbasis data, pengendalian pelaksanaan investasi, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Dengan demikian, penyesuaian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam mendukung target RPJMD 2021–2026, khususnya dalam meningkatkan realisasi investasi PMDN/PMA serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun tabel pengurangan anggaran dan pengurangan target kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Matriks Hasil Verifikasi Pelaksanaan RKPD Caturwulan III Dan Usulan Perubahan RKPD
Tahun 2025

Program /Kegiatan/Su b Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	RENJA OPD (SIPD)			PENETAPAN APBD 2025			RASIONALISASI APBD 2025			USULAN PERUBAHAN RENJA			ALASAN PERUBAHAN
		Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	PAGU	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan investasi daerah		30,75%	27.786.7 05.030,0 0		30,75%	27.452.633 .365,00		30,75%	22.318.303. 015,00	Kab. Kutai Kartanegara	10,90%	21.179.471. 884,00	Dilakukan penyesuaian target kinerja dikarenakan adanya efisiensi dari pemerintah; Realisasi Investasi yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya merupakan dampak dari masuknya proyek jangka panjang namun Investasi lanjutan dalam jangka pendek tidak serta merta meningkat secara signifikan, sehingga target pertumbuhan disesuaikan secara realitas; ketidakpastian ekonomi global.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Kab. Kutai Kartanegara	94,90 Nilai	18.856.8 22.130,0 0	Kab. Kutai Kartanegara	94,90 Nilai	18.522.750 .465,00	Kab. Kutai Kartanegara	94,90 Nilai	16.622.933. 267,00	Kab. Kutai Kartanegara	77 Nilai	16.386.169. 136,00	dilakukan penyesuaian target kinerja dengan PK kepala perangkat daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	19 Dokumen	1.192.00 0.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	19 Dokumen	1.192.000. 000,00	Kab. Kutai Kartanegara	19 Dokumen	565.569.59 3,00	Kab. Kutai Kartanegara	13 Dokumen	565.569.59 3,00	Dilakukan penyesuaian terget dikarenakan kebutuhan dokumen dan juga efisiensi anggaran

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	592.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	592.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	5 Dokumen	262.881,393,00	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	262.881,393,00	Dilakukan penyesuaian terget dikarenakan kebutuhan dokumen dan juga efisiensi anggaran sebesar 329.118.607 dan penyesuaian antar rekening belanja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	26.044.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	26.044.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 23.956.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	26.846.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	26.846.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 23.154.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	76.082.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	76.082.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 73.918.000

Penyelenggaran Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaran Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.00,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.797.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.797.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 24.203.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup PD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	250.000.000,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	250.000.000,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	116.458.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	116.458.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 133.542.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	50.000.00,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	31.461.200,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita Acara	31.461.200,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 133.542.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab. Kutai Kartanegara	100%	10.892.789.071,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	10.430.551.190,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	10.064.966.554,00	Kab. Kutai Kartanegara	80%	10.997.224.634,00	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	66 orang/bulan	9.894.305.945,00	Kab. Kutai Kartanegara	66 orang/bulan	9.432.068,064,00	Kab. Kutai Kartanegara	66 orang/bulan	9.432.068,064,00	Kab. Kutai Kartanegara	101 orang/bulan	10.410.826,144,00	Dilakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp.987.758.080 dari kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	215.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	215.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	95.266.610,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	95.266.610,00	dilakukan efisiensi anggaran sebesar 119.733.390
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	377.483.126,00	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	377.483,126,00	Kab. Kutai Kartanegara	7 Dokumen	164.025,050,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	117.525,050,00	Dilakukan penyesuaian terget dikarenakan kebutuhan dokumen dan juga efisiensi anggaran sebesar 213.458.076 dan sebesar Rp. 46.500.000 kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	381.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	381.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	361.666.830,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	361.666.830,00	Dilakukan efisiensi anggaran sebesar 19.333.170
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	11.940.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	11.940.000,00	Dilakukan efisiensi anggaran sebesar 13.060.000
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>337.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>337.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>204.211.310,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>204.211.310,00</i>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	14.846.850,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	14.846.850,00	Dilakukan efisiensi anggaran sebesar 10.153.150

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.00,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	22.922.080,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	22.922.080,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 27.077.920
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	5 laporan	30.000.00,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	5 laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	5 laporan	16.138.260,00	Kab. Kutai Kartanegara	5 laporan	16.138.260,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 13.861.740
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	222.000.000,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	222.000.000,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	145.668.120,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	145.668.120,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 76.331.880
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.00,00,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	4.636.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	4.636.000,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 5.364.000
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>20.000.00,00,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>13.201.340,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>13.201.340,00</i>	

Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.00,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	6.876.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	6.876.000,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 3.124.000
Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	10.000.00,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	6.325.340,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	6.325.340,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 3.674.660
<i>Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepergawainan</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>552.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>552.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>252.968.760,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>252.968.760,00</i>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapananya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapananya	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	127.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	127.000.000,00			-				Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 127.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	55.701.380,00	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	55.701.380,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 44.298.620
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang	75.000.00,00	Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	15 Orang	54.185.380,00	Kab. Kutai Kartanegara	5 Orang	54.185.380,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 20.814.620

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	75 Orang	143.082.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	20 Orang	143.082.000,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 106.918.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	Kab. Kutai Kartanegara	100%	1.568.03 0.791,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	1.568.030. 791,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	1.173.796.6 94,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	1.116.077.8 59,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	282.423.715,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 17.576.285
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	293.079.772,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	293.079.772,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	293.079.772,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	290.143.572,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 2.936.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	20.000.000,00	

Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	561.935.145,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	561.935.145,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	231.090.572,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	231.090.572,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 330.884.573
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	42.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	42.420.000,00	Dilakukan efesiensi anggaran sebesar 7.580.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	93.015.874,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	93.015.874,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	37.206.350,00			-	dilakukan efesiensi anggaran sebesar Rp. 93.015.874
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100%	361.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	361.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	299.101.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	299.101.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit	361.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit	361.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	20 Unit	299.101.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	25 Unit	299.101.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar Rp. 61.899.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	100%	2.805.382.268,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	2.933.548.484,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	2.927.788.016,00	Kab. Kutai Kartanegara	100%	1.815.984.640,00	

Pemerintah Daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	3.000.000,00	-	dilakukan efesiensi anggaran sebesar Rp. 3.000.0000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	138.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	266.766.216,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	266.766.216,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	266.766.216,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	24 Laporan	136.242.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	24 Laporan	136.242.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	24 Laporan	132.990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	115.709.239,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.20.532.761
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	2.527.540.268,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	2.527.540.268,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	2.525.031.800,00	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.433.509.185,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.1.094.031.083

<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>1.128.620.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>1.128.620.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>1.121.330.00,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100%</i>	<i>1.121.830.00,00</i>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara	144 Unit	498.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	144 Unit	498.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	144 Unit	495.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	23 Unit	495.640.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.2.980.000 dan penyesuaian targe kinerjat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	80 Unit	80.000.00,00	Kab. Kutai Kartanegara	80 Unit	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	80 Unit	79.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	80 Unit	79.680.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar Rp.320.000
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	546.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	546.510.000,00	Dilakukan penambahan Anggaran sebesar 46.500.000 untuk Rehab MPP dari Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
<i>Program Pengembangan Iklim Pemanenan Modal</i>	<i>Jumlah Proyek (PMA/PMDN)</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>665 Proyek</i>	<i>2.600.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>665 Proyek</i>	<i>2.600.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>665 Proyek</i>	<i>1.717.281.800,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>665 Proyek</i>	<i>1.717.281.800,00</i>	

<i>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>240.861.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>240.861.000,00</i>	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar	Kab. Kutai Kartanegara	100 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	100 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	100 Dokumen	240.861.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	50 Dokumen	240.861.000,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 259.139.000 dan penyesuaian target kinerja
<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>2.100.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>2.100.000.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>1.476.420.800,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>1.476.420.800,00</i>	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	213.793.800,00	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	213.793.800,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 86.206.200

Penyusunan Peta Pensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.262.627,00	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.262.627,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 537.373.000
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.098.959,20	Kab. Kutai Kartanegara	200 Investor	1.098.959,20	
Penyelenggaran Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	340 Investor	1.098.959,20	Kab. Kutai Kartanegara	200 Investor	1.098.959,20	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	6 Dokumen	700.591,40	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	700.591,40	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 249.408.600 dan penyesuaian target kinerja
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	398.367,80	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	398.367,80	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 201.632.200

<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>IKM</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>92 Nilai</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>92 Nilai</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>92 Nilai</i>	<i>846.643,775,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>92 Nilai</i>	<i>846.643,775,00</i>	
<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Izin</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>12500 Izin</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>12500 Izin</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>12500 Izin</i>	<i>846.643,775,00</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>12500 Izin</i>	<i>846.643,775,00</i>	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan berusaha Berbasis Risiko terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	1200 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1200 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1200 Kegiatan Usaha	230.627.550,00	Kab. Kutai Kartanegara	250 Kegiatan Usaha	230.627.550,00	Dilakukan pengurangan target kinerja dikarenakan efisiensi anggaran sebesar Rp. 369.372.450

Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	355.268.425,00	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	355.268.425,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 94.731.575
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	650 Pelaku Usaha	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	650 Pelaku Usaha	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	650 Pelaku Usaha	260.747.800,00	Kab. Kutai Kartanegara	350 Pelaku Usaha	260.747.800,00	Dilakukan pengurangan target kinerja dikarenakan efisiensi anggaran sebesar Rp. 339.252.200
Program Pengendalian Pelaksanaan	Pen�ikan /Penurunan Nilai	Kab. Kutai Kartanegara	30.75%	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	30.75%	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	30.75%	619.102.773,00	Kab. Kutai Kartanegara	2%	619.102.773,00	Disesuaikan dengan Realisasi tahun sebelumnya dan kinerja serta efesiensi anggaran

Penanaman Modal	Realisasi PMDN													
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	Kab. Kutai Kartanegara	1020 Pelaku usaha/ kegiatan usaha	1.200,00 0.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1020 Pelaku usaha/kegiatan usaha	1.200.000. 000,00	Kab. Kutai Kartanegara	1020 Pelaku usaha/ kegiatan usaha	619.102,77 3,00	Kab. Kutai Kartanegara	1000 Pelaku Usaha/kegiatan Usaha	619.102,77 3,00	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	200.000. 000,00	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	200.000.00 0,00	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	90.847.800, 00	Kab. Kutai Kartanegara	60 Kegiatan Usaha	90.847.800, 00	Dilakukan pengurangan target kinerja dikarenakan efisiensi anggaran Rp. 109.152.200
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku Usaha	600.000. 000,00	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku Usaha	600.000.00 0,00	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku Usaha	348.256.20 0,00	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku Usaha	348.256.20 0,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 251.743.800

Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kegiatan Usaha	400.000.000,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kegiatan Usaha	400.000.000,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kegiatan Usaha	179.998.773,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	50 Kegiatan Usaha	179.998.773,00	Dilakukan pengurangan target kinerja dikarenakan efisiensi anggaran sebesar Rp. 220.001.227
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<i>Persentase tersedianya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>3 Aplikasi</i>	<i>1.929.882.900,00</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>3 Aplikasi</i>	<i>1.929.882.900,00</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>3 Aplikasi</i>	<i>1.413.382.200,00</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>100%</i>	<i>511.315.200,00</i>	dilakukan perubahan target disesuaikan dengan capaian indikator SMART
<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>3 Aplikasi</i>	<i>1.929.882.900,00</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>3 Aplikasi</i>	<i>1.929.882.900,00</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>3 Aplikasi</i>	<i>1.413.382.200,00</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>100%</i>	<i>511.315.200,00</i>	dilakukan perubahan target disesuaikan dengan capaian indikator SMART

<i>Kabupaten/Kota</i>														
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintgrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintgrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	1.929.882.900,00	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	1.929.882.900,00	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	1.413.382.200,00	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	511.315.200,00	dilakukan efesiensi anggaran sebesar 1.418.567.700

3.4 Keterkaitan program dan kegiatan dengan isu strategis.

Seluruh program dan kegiatan DPMPTSP Kutai Kartanegara Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dengan isu-isu strategis yang diidentifikasi dalam *Renstra 2021–2026* dan diperkuat dalam *Renja 2025*. Isu utama yang dihadapi meliputi: tuntutan penerapan teknologi informasi yang semakin tinggi, ketidaksinkronan regulasi antar kementerian dan lembaga, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang handal di bidang perizinan dan investasi, serta belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Program dan kegiatan yang dikembangkan pada tahun 2025 dirancang untuk merespon langsung isu-isu tersebut, baik melalui peningkatan kapasitas internal maupun penguatan sistem pelayanan investasi berbasis risiko.

Program *Pengembangan Iklim Penanaman Modal* dan *Pelayanan Penanaman Modal* menjadi tulang punggung utama dalam menjawab tantangan peningkatan realisasi investasi dan efektivitas pengawasan penanaman modal. Dalam konteks refocusing 2025, peningkatan pagu anggaran pada kedua program ini diarahkan untuk mendukung promosi investasi yang lebih inovatif, penyusunan peta potensi investasi berbasis *Investment Project Ready to Offer (IPRO)*, serta penguatan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat berbasis digital. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas isu strategis mengenai rendahnya kualitas informasi investasi dan lemahnya penyebarluasan potensi daerah.

Kegiatan *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan* dan *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor* juga berhubungan langsung dengan isu strategis peningkatan kualitas kelembagaan dan pelayanan publik.

Melalui refocusing anggaran, DPMPTSP melakukan modernisasi ruang pelayanan, memperkuat infrastruktur pendukung *Mal Pelayanan Publik (MPP)*, serta memperbarui peralatan teknologi informasi yang menunjang digitalisasi perizinan. Upaya ini sejalan dengan isu strategis “peningkatan kinerja kelembagaan dan pengelolaan data terintegrasi” sebagaimana tercantum dalam *Renstra DPMPTSP 2021–2026*.

Program *Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal* menjadi respons langsung terhadap isu strategis mengenai belum tersedianya sistem informasi investasi yang terintegrasi secara elektronik serta belum adanya standar keamanan data dan manajemen anti-penyuapan di lingkungan DPMPTSP dan MPP. Kegiatan ini mencakup pengembangan sistem digital berbasis risiko, sertifikasi ISO 27001 (Keamanan Data) dan ISO 37001:2016 (Anti Penyuapan), serta optimalisasi aplikasi *Pelongseng* dan *e-Pantau Investasi*. Program ini mendukung implementasi *good governance* serta menjawab tantangan peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara program dan isu strategis DPMPTSP Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencerminkan pendekatan integratif yang menyeimbangkan aspek reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengendalian investasi berkelanjutan. Refocusing program dan kegiatan yang tercantum dalam tabel perubahan RKPD 2025 merupakan strategi penyesuaian yang diarahkan untuk menjawab isu-isu prioritas tersebut secara konkret. Dengan demikian, setiap kegiatan yang diubah, ditambah, atau dikurangi tetap berorientasi pada pencapaian sasaran strategis Renstra dan

mendukung misi RPJMD 2021–2026, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang efektif, investasi yang berdaya saing, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari *Renstra DPMPTSP 2021–2026* yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan serta kebijakan *refocusing* dalam *Perubahan RKPD 2025*. Dalam konteks perubahan ini, setiap program dan kegiatan difokuskan untuk menjawab isu strategis daerah seperti peningkatan daya saing investasi, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kelembagaan perizinan dan penanaman modal. Dengan demikian, penjabaran program tidak hanya menggambarkan rincian kegiatan dan target capaian, tetapi juga memastikan keterkaitan langsung dengan indikator kinerja utama daerah dan misi pembangunan RPJMD 2021–2026.

Secara umum, DPMPTSP Kukar pada Tahun 2025 melaksanakan lima program utama, yaitu: (1) *Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*; (2) *Program Pelayanan Penanaman Modal*; (3) *Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*; (4) *Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*; dan (5) *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*. Kelima program tersebut diarahkan untuk memperkuat peran DPMPTSP sebagai pelaksana pelayanan publik dan fasilitator investasi daerah. Setiap program diuraikan berdasarkan indikator kinerja, target capaian, dan lokasi kegiatan yang

secara strategis tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus penguatan kawasan ekonomi potensial yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Program *Pengembangan Iklim Penanaman Modal* menjadi prioritas utama karena berfungsi mendorong pertumbuhan investasi daerah melalui kegiatan seperti *Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah, dan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)*. Program ini menargetkan peningkatan nilai realisasi investasi hingga Rp7,4 triliun pada akhir tahun 2025 dan penyusunan tiga dokumen strategis IPRO yang menjadi referensi utama bagi investor. Adapun Program *Pelayanan Penanaman Modal* diarahkan untuk memperluas akses kemudahan berusaha melalui optimalisasi *Mal Pelayanan Publik (MPP)* dan digitalisasi sistem pelayanan perizinan berbasis risiko, dengan target peningkatan *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* mencapai 89,52 nilai.

Selanjutnya, Program *Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal* serta *Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal* difokuskan untuk memperkuat tata kelola investasi yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Kegiatan di dalamnya meliputi pengembangan *aplikasi pelongseng*, sertifikasi ISO 27001 tentang Keamanan Data, serta sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan DPMPTSP dan MPP. Langkah ini merupakan wujud konkret penerapan prinsip *good governance* dan respon terhadap isu strategis berupa meningkatnya tuntutan transparansi pelayanan publik serta perlunya kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi di daerah.

Sementara itu, *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* meliputi kegiatan operasional pendukung seperti *pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penatausahaan arsip dinamis, dan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan*. Program ini memastikan kinerja kelembagaan DPMPTSP tetap optimal dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dalam keseluruhan penjabaran ini, seluruh program dan kegiatan telah disusun dengan indikator kinerja yang terukur, target capaian yang realistik, serta lokasi pelaksanaan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Penjabaran program dan kegiatan perubahan tahun 2025 ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara efektivitas perencanaan, efisiensi anggaran, dan peningkatan hasil nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2 Perubahan Prioritas dan Matriks Program/Kegiatan

Perubahan prioritas program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan Renja Murni serta penyesuaian terhadap kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam *Perubahan RKPD Tahun 2025*. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan isu strategis daerah, arah kebijakan nasional, dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berfokus pada peningkatan iklim investasi dan efisiensi pelayanan publik. Melalui proses penajaman prioritas ini, DPMPTSP berupaya mengalihkan sumber daya dari kegiatan yang kurang produktif menuju

program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kinerja investasi dan kepuasan masyarakat.

Secara substansi, beberapa program mengalami penguatan prioritas, terutama pada *Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal* dan *Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal*. Kedua program tersebut dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan target utama RPJMD dalam meningkatkan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Kegiatan seperti *Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah* dan *Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)* mengalami efisiensi pada alokasi anggaran. Efisiensi ini dilakukan untuk menyesuaikan kinerja dengan anggaran yang telah diefisiensi walaupun begitu efisiensi ini tetap bisa mendukung pencapaian dokumen potensi investasi berstandar IPRO serta penyusunan peta potensi zona industri penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), yang merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Selain itu, pengurangan atau direlokasi. Kegiatan *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* yang sebelumnya dikelola oleh DPMPTSP dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk rasionalisasi kelembagaan dan efisiensi penggunaan anggaran. Begitu pula dengan pengurangan pagu pada kegiatan yang bersifat administratif atau tidak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Realokasi anggaran hasil pengurangan ini dialihkan ke kegiatan prioritas baru seperti *Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Berbasis*

Risiko serta Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan DPMPTSP dan MPP. Dengan langkah ini, kegiatan prioritas diarahkan untuk menghasilkan keluaran yang konkret, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik.

Perubahan prioritas juga diwujudkan melalui pembentukan kegiatan pendukung baru yang bersifat inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Salah satunya adalah *Kegiatan Penguatan Promosi Investasi Digital dan Kemitraan UMKM-Investor* yang mendukung keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok investasi daerah. Kegiatan ini menjadi respon terhadap isu strategis keterbatasan akses pelaku UMKM terhadap pasar modal dan peluang kemitraan. Selain itu, DPMPTSP memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui *Pelatihan Teknis Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko* yang bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur serta kemampuan adaptasi terhadap sistem pelayanan digital. Perubahan tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan dalam RPJMD 2021–2026.

Seluruh perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam *Matriks Hasil Verifikasi Pelaksanaan RKPD Caturwulan III Dan Usulan Perubahan RKPD Tahun 2025* yang berisi informasi lengkap mengenai kode urusan, nama program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian, pagu awal dan pagu perubahan, serta alasan rasionalisasi anggaran. Matriks ini menjadi dokumen utama dalam proses penetapan *Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan DPMPTSP Tahun 2025*. Melalui matriks tersebut, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat diwujudkan. Perubahan prioritas ini

tidak hanya berorientasi pada efisiensi keuangan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai instansi pelayan investasi yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional.

4.3 Rencana Kebutuhan dan Sumber Pendanaan

Rencana kebutuhan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dan kebijakan refocusing dalam *Perubahan RKPD 2025*. Pendanaan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*). Kebutuhan anggaran mencakup belanja langsung dan tidak langsung yang mendukung fungsi pelayanan publik dan investasi daerah. Fokus utama kebutuhan pendanaan adalah memperkuat digitalisasi perizinan, penyusunan peta potensi investasi yang berstandar IPRO, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pelayanan berbasis risiko dan investasi hijau.

Kebutuhan pendanaan terbesar dialokasikan untuk *Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal* dengan total pagu perubahan mencapai Rp1,7 miliar. Pendanaan kegiatan strategis seperti *Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah*, dan *Penyusunan RUPM* yang menjadi dasar promosi investasi dan penguatan iklim usaha di Kutai Kartanegara. Selain itu, *Program Pelayanan Penanaman Modal* mendapatkan dukungan pendanaan untuk peningkatan layanan MPP dan pengembangan sistem pelayanan digital guna mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 98,02 pada bulan September tahun 2025.

Sumber pendanaan utama kegiatan DPMPTSP berasal dari *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara*, Pendanaan yang bersumber dari APBD diarahkan pada kegiatan pelayanan publik dan promosi investasi daerah dan juga dioptimalkan untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan sistem informasi, dan fasilitasi kemitraan UMKM dengan investor.

Analisis rasionalitas pendanaan menunjukkan bahwa alokasi anggaran dalam perubahan tahun 2025 lebih efisien dan terukur dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan non-produktif seperti perjalanan dinas, rapat koordinasi rutin, serta belanja operasional yang tidak mendukung kinerja langsung dikurangi dan dialihkan pada kegiatan yang memiliki dampak ekonomi nyata. Efisiensi ini tercermin dari peningkatan rasio manfaat terhadap biaya (*cost-effectiveness ratio*), terutama pada kegiatan digitalisasi pelayanan perizinan dan pengembangan promosi investasi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kinerja pelayanan publik dan daya saing investasi daerah.

Dengan demikian, rencana kebutuhan dan sumber pendanaan DPMPTSP Tahun 2025 dalam dokumen perubahan ini menjadi instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas. Pengalokasian anggaran yang lebih terarah dan berbasis hasil tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat peran DPMPTSP sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Melalui optimalisasi sumber daya keuangan dan sinergi lintas sektor, diharapkan kegiatan investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan, menciptakan

lapangan kerja baru, serta mendukung transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara menuju daerah yang berdaya saing, modern, dan berkelanjutan.

4.4 Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Rasionalisasi Anggaran

Analisis efisiensi, efektivitas, dan rasionalisasi anggaran DPMPTSP Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh belanja yang dialokasikan benar-benar memberikan hasil nyata sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Efisiensi anggaran diukur melalui perbandingan antara input (besaran dana) dan output yang dihasilkan dalam setiap program dan kegiatan, sedangkan efektivitas dilihat dari sejauh mana realisasi kegiatan memberikan dampak terhadap capaian indikator strategis, seperti peningkatan realisasi investasi, kemudahan berusaha, dan kepuasan masyarakat. Analisis ini juga berfungsi sebagai dasar kebijakan refocusing agar penggunaan anggaran lebih berorientasi hasil (*result-oriented budgeting*) dan menghindari pemborosan fiskal.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan DPMPTSP termasuk kategori tinggi dengan realisasi rata-rata capaian indikator kinerja mencapai di atas 53,31%. Namun, masih ditemukan beberapa kegiatan yang memerlukan optimalisasi karena belum memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam tahun anggaran 2025 dilakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang bersifat administratif dan berbiaya tinggi, seperti rapat koordinasi rutin dan perjalanan dinas, untuk dialihkan ke kegiatan prioritas seperti digitalisasi pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyusunan peta potensi investasi berbasis IPRO yang lebih berdampak terhadap peningkatan investasi daerah.

Dari sisi efisiensi, terdapat penghematan anggaran yang cukup signifikan akibat penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Digitalisasi proses perizinan dan pelaporan investasi melalui *Sistem OSS Berbasis Risiko* serta *Aplikasi Pelongseng DPMPTSP* mengurangi biaya operasional dan waktu pelayanan secara substansial. Pemanfaatan sistem elektronik juga menekan kebutuhan belanja bahan habis pakai, konsumsi rapat, dan biaya pengarsipan dokumen manual. Selain itu, kebijakan penggunaan kembali aset kantor melalui kegiatan *rehabilitasi sarana dan prasarana gedung* yang lebih selektif turut berkontribusi dalam menjaga efisiensi belanja modal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Analisis efektivitas juga menunjukkan bahwa alokasi tambahan anggaran untuk program strategis seperti *Pengembangan Iklim Penanaman Modal* dan *Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal* berbanding lurus dengan peningkatan kinerja output. Misalnya, kegiatan promosi investasi dan penyusunan peta potensi berstandar IPRO secara empiris terbukti meningkatkan minat investor dan memperluas jangkauan kerja sama daerah dengan pelaku usaha nasional maupun internasional. Kegiatan sertifikasi ISO 27001 dan ISO 37001 juga memperkuat kredibilitas DPMPTSP sebagai lembaga pelayanan publik yang berintegritas dan profesional, sekaligus menjawab isu strategis terkait transparansi, keamanan data, dan tata kelola yang akuntabel.

Dengan demikian, hasil analisis efisiensi dan efektivitas menunjukkan bahwa refocusing dan rasionalisasi anggaran yang dilakukan pada tahun 2025 telah menghasilkan pergeseran belanja menuju kegiatan produktif yang bernilai tambah tinggi. Rasionalisasi anggaran tidak hanya menciptakan penghematan keuangan

daerah, tetapi juga memperkuat orientasi pembangunan ekonomi berbasis investasi yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan fiskal yang efisien dan efektif, DPMPTSP mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pengembangan investasi dan pelayanan publik, sehingga kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2021–2026 dapat semakin optimal.

4.5 Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Perubahan

Perbandingan antara pagu awal dan pagu perubahan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menggambarkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah sebagai akibat dari dinamika kebutuhan pelayanan publik, prioritas pembangunan, serta realokasi sumber daya pada kegiatan strategis. Pagu perubahan disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, pelaksanaan triwulan pertama dan kedua tahun berjalan, serta hasil sinkronisasi antara *Renja Perubahan DPMPTSP* dengan *Perubahan RKPD 2025*. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas belanja publik yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting), dengan tetap menjaga konsistensi terhadap arah kebijakan RPJMD 2021–2026.

Secara umum, terdapat peningkatan total pagu anggaran pada DPMPTSP dalam perubahan tahun 2025 dibandingkan dengan pagu awal. Kenaikan ini terutama terjadi pada program prioritas seperti *Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal* yang mengalami efisiensi Rp2,6 miliar menjadi Rp1,7 miliar, serta *Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal* yang naik dari Rp1,9 miliar menjadi Rp.511 juta. Efisiensi anggaran tersebut didorong

oleh penyesuaian dana transfer dari pusat kedaerah dimana kegiatan tetap harus dijalankan walaupun terjadi pengurangan output. Kegiatan *Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah* dan *Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)* merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, program dan kegiatan lain juga mengalami penurunan pagu akibat refocusing anggaran. Salah satunya adalah *Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* yang sebelumnya dialokasikan pada DPMPTSP, namun kemudian dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan konsolidasi sistem digital terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, kegiatan yang bersifat administratif seperti *perjalanan dinas*, *pengadaan alat tulis kantor*, dan *belanja jasa umum* turut mengalami pengurangan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja daerah. Pengalihan dana hasil efisiensi ini diarahkan pada program pelayanan publik yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan.

Analisis terhadap perbandingan pagu awal dan pagu perubahan menunjukkan bahwa struktur belanja DPMPTSP semakin berorientasi pada kegiatan produktif. Persentase belanja langsung terhadap total anggaran meningkat secara signifikan, menunjukkan adanya pergeseran dari pengeluaran operasional ke arah pengeluaran yang menghasilkan output nyata. Hal ini sejalan dengan kebijakan *value for money*, di mana setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur. Perbandingan ini juga menjadi dasar dalam proses penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025, yang memastikan setiap kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis organisasi.

Secara keseluruhan, perubahan pagu anggaran DPMPTSP Tahun 2025 mencerminkan respons adaptif pemerintah daerah terhadap kebutuhan pembangunan yang dinamis serta upaya memperkuat kinerja lembaga dalam bidang pelayanan investasi. Melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran, struktur pendanaan DPMPTSP menjadi lebih proporsional antara kebutuhan operasional dan pembiayaan kegiatan prioritas. Hasil perbandingan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga mempertegas peran DPMPTSP sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah berbasis investasi berkelanjutan, transparansi layanan, dan efektivitas pengelolaan anggaran publik.

Adapun Perbandingan pagu awal dan pagu perubahan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			30,68	27.786.705.030,00				0	21.179.471.884,00	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	94,90 Nilai	18.856.822.130,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	77 Nilai	16.386.169.136,00	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	15 Dokumen	1.192.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	13 Dokumen	565.569.593,00	
1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	25.797.000,00	
2	Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	116.458.000,00	
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daera	1 Berita Acara	50.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	1 Berita Acara	31.461.200,00	

4	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	592.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	4 Dokumen	262.881.393,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	26.044.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	26.846.000,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	76.082.000,00	
B	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Keuangan	100%	10.892.789.071,00	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administasi Keuangan	83 Persen	10.997.224.634,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang/bulan	9.894.305.945,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	10.410.826.144,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	215.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	95.266.610,00	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	7 Dokumen	377.483,1	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	117.525.050,0	

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	381.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	361.666.830,00	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.940.000,00	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	100%	337.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	204.211.310,00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	14.846.850,00	
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	22.922.080,00	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	30.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	16.138.260,00	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	222.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	145.668.120,00	
5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.636.000,00	

D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	2 Dokumen	20.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	2 Dokumen	13.201.340,00	
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	6.876.000,00	
2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	10.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	6.325.340,00	
E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	552.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi Kepegawaian	100 Persen	252.968.760,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	127.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	55.701.380,00	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	75.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	54.185.380,00	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	250.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	143.082.000,00	
F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi umum	100%	1.568.030.791,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Administrasi umum	100 Persen	1.116.077.859,00	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	300.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	282.423.715,00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	293.079.772,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	290.143.572,00	

3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	250.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	250.000.000,00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	561.935.145,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	231.090.572,00	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	42.420.000,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	93.015.874,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	
G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	361.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	299.101.000,00	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	361.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	299.101.000,00	
H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Percentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	100%	2.805.382.268,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Percentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	100 Persen	1.815.984.640,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	266.766.216,00	

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.527.540.268,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.709.239,00	
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	136.242.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.433.509.185,00	
I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Percentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.128.620.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Percentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.121.830.000,00	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	550.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	495.640.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	144 Unit	498.620.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	79.680.000,00	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	80.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	546.510.000,00	
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	665 Proyek	2.600.000.000,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	665 Proyek	1.717.281.800,00	
A	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	240.861.000,00	

1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	100 Dokumen	500.000.000,00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	50 Dokumen	240.861.000,00	
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	2.100.000.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	3 Dokumen	1.476.420.800,00	
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peta PotensiInvestasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.800.000.000,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peta PotensiInvestasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	3 Dokumen	213.793.800,00	
2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.262.627.000,00	
III	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Investor (PMA/PMDN)</i>	<i>340 Investor</i>	<i>1.550.000.000,00</i>	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Investor (PMA/PMDN)</i>	<i>200 Investor</i>	<i>1.098.959.200,00</i>	
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	340 Investor	1.550.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	200 Investor	1.098.959.200,00	
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	600.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	700.591.400,00	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	950.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	398.367.800,00	
IV	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Penerbitan Izin</i>	<i>12.000 Izin</i>	<i>1.650.000.000,00</i>	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Penerbitan Izin</i>	<i>12500 Izin</i>	<i>846.643.775,00</i>	

A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,96 Nilai	1.650.000.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,52 Nilai	846.643.775,00	
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	600.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 Pelaku Usaha	230.627.550,00	
2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	650 Kegiatan Usaha	600.000.000,00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	350 Kegiatan Usaha	355.268.425,00	
3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	450.000.000,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	260.747.800,00	
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Peningkatan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	30.68%	1.200.000.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Peningkatan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	0 persen	619.102.773,00	
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengendalian PMA / PMDN	1020 Pelaku usaha/kegiatan usaha	1.200.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengendalian PMA / PMDN	424 Pelaku Usaha/kegiatan Usaha	619.102.773,00	

	menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota					Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota					
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan Usaha	90.847.800,00	
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	600.000.000,00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	348.256.200,00	
3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha	400.000.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	24 Kegiatan Usaha	179.998.773,00	
VI	<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Aplikasi</i>	<i>3 Aplikasi</i>	<i>1.929.882.900,00</i>	<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>Jumlah Aplikasi</i>	<i>3 Aplikasi</i>	<i>511.315.200,00</i>	
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	1.929.882.900,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	511.315.200,00	

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	17 Dokumen	1.929.882.900,00	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	511.315.200,00	

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan penyusunan kembali rencana program dan kegiatan tahun 2025 dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pendanaan serta arah strategis pembangunan daerah. Penyusunan *Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026* ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan DPMPTSP tetap selaras dengan misi pembangunan daerah, khususnya misi untuk memantapkan birokrasi yang bersih dan melayani, memperkuat pembangunan ekonomi berbasis investasi, serta memperluas kemitraan antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat.

Perumusan kembali rencana program dan kegiatan ini mencerminkan dinamika pelaksanaan kebijakan investasi di daerah yang menuntut adaptasi terhadap isu strategis terkini seperti hilirisasi ekonomi, pengembangan kawasan penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penguatan kapasitas pelayanan publik melalui digitalisasi sistem perizinan berusaha. Oleh karena itu, perubahan program dan kegiatan tahun 2025 diarahkan pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan iklim investasi, optimalisasi pelayanan perizinan, dan penguatan tata kelola investasi berkelanjutan. Prakiraan maju tahun 2026 disusun untuk memberikan arah keberlanjutan program, memastikan kesinambungan capaian indikator kinerja, serta menjadi dasar dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun berikutnya.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan efisiensi dan efektivitas belanja daerah, rencana program dan kegiatan DPMPTSP juga disusun berdasarkan prinsip *value for money* dan penguatan kinerja berbasis hasil (*result-based management*). Proses penyusunan tabel rencana ini mencakup identifikasi setiap program, indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kebutuhan dana, serta sumber pendanaan, baik dari APBD maupun potensi kemitraan strategis. Oleh karena itu,

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 disajikan untuk menggambarkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan sasaran kinerja DPMPTSP, serta menjadi instrumen akuntabilitas dalam mendukung arah pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel. 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Tujuan			Meningkatnya daya saing investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	0%	21.179.471.884	APBD		0,8%	19.460.390.481	
Sasaran			Meningkatnya realisasi investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi Insvestasi (PMDN/PMA)		7,45 Triliun Rupiah		APBD		7,55 Triliun Rupiah		
Sasaran			Meningkatnya kualitas Pelayanan di DPMPTSP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,52 nilai		APBD		92 Nilai		
2	18	I		<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kab. Kutai Kartanegara	74,13 Nilai	16.386.169.136,00	APBD		72,83	15.909.390.481
2	18	I	02.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	13 Dokumen	565.569.593,00	APBD		100 Persen	753.671.500
2	18	1	02.01	Penyusunan Dokumen Perencanann Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	262.881.393,00	APBD		2 Dokumen	150.000.000

2	18	1	02.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	26.044.000,00	APBD		4 Dokumen	-
2	18	1	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	26.846.000,00	APBD		7 laporan	50.000.000
2	18	1	02.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	76.082.000,00	APBD		2 Laporan	60.343.200
2	18	1	02.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	umlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	25.797.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000
2	18	1	02.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	umlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Data	116.458.000,00	APBD		1 data	100.000.000
2	18	1	02.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Berita acara	31.461.200,00	APBD		1 berita acara	50.000.000
2	18	1	02.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	APBD		2 Dokumen	293.328.300

2	18	I	02.02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administasi Keuangan	Kab. Kutai Kartanegara	80 Persen	10.997.224.634,00	APBD		88,39 persen	11.850.949.029
2	18	1	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan	Kab. Kutai Kartanegara	100 orang/bulan	10.410.826.144,00	APBD		98 Orang/bulan	11.381.533.629
2	18	1	02.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		43 Dokumen	33.750.000
2	18	1	02.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara			APBD		1 Dokumen	33.750.000
2	18	1	02.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	95.266.610,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2	18	1	02.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	117.525.050,00	APBD		1 Dokumen	18.703.800
2	18	1	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	361.666.830,00	APBD		3 Laporan	299.461.600
2	18	1	02.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	1 dokumen	11.940.000,00	APBD		1 Dokumen	33.750.000

2	18	I	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administasi Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	204.211.310,00	APBD		100 Persen	164.999.000
2	18	1	02.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	14.846.850,00	APBD		2 Dokumen	14.999.000
2	18	1	02.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	22.922.080,00	APBD		2 Laporan	50.000.000
2	18	1	02.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 laporan	16.138.260,00	APBD		6 laporan	40.000.000
2	18	1	02.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 laporan	145.668.120,00	APBD		1 Laporan	50.000.000
2	18	1	02.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	4.636.000,00	APBD		2 Dokumen	10.000.000
2	18	I	02.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	13.201.340,00	APBD		100 Persen	20.000.000
2	18	1	02.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Laporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	6.876.000,00	APBD			-
2	18	1	02.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	6.325.340,00	APBD		1	20.000.000

2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	252.968.760,00	APBD		100 Persen	175.000.000
2	18	1	02.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara						
2	18	1	02.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dukungan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	55.701.380,00	APBD		4 Laporan	25.000.000
2	18	1	02.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	5 Orang	54.185.380,00	APBD		160 Orang	100.000.000
2	18	1	02.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Kartanegara	10 Orang	143.082.000,00	APBD		75 Orang	50.000.000
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.116.077.859,00	APBD		100 Persen	150.000.000
2	18	1	02.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 paket	282.423.715,00	APBD		1 paket	300.000.000
2	18	1	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Paket	290.143.572,00	APBD		1 paket	300.000.000

2	18	1	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	2 paket	250.000.000,00	APBD		2 Paket	250.000.000
2	18	1	02.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bagan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Dokumen	20.000.000,00	APBD		12 Dokumen	25.000.000
2	18	1	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	231.090.572,00	APBD		12 laporan	250.000.000
2	18	1	02.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	500 Dokumen	42.420.000,00	APBD		8500 Dokumen	50.000.000
2	18	1	02.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah kegiatan/berita	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD			
2	18	1	02.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	299.101.000,00	APBD			-
2	18	1	02.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	25 unit	299.101.000,00	APBD			-
2	18	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	100 Persen	1.815.984.640,00	APBD		100 Persen	1.639.060.952
2	18	1	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		2 Laporan	2.500.000

2	18	1	02.09	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	266.766.216,00	APBD		12 Laporan	266.766.216
2	18	1	02.09	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	115.709.239,00	APBD		12 Laporan	36.421.200
2	18	1	02.09	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	12 Laporan	1.433.509.185,00	APBD		12 Laporan	1.333.373.536
2	18	1	02.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>100 persen</i>	<i>1.121.830.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>100 Persen</i>	<i>1.155.710.000</i>
2	18	1	02.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Kutai Kartanegara	23 Unit	495.640.000,00	APBD		20 unit	565.710.000
2	18	1	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	80 Unit	79.680.000,00	APBD		189 unit	90.000.000
2	18	1	02.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara	3 Unit	546.510.000,00	APBD		1 Unit	500.000.000

2	18	I	02.13		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara		0,00	APBD				-
2	18	1	02.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD				-
2	18	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	Kab. Kutai Kartanegara	665 Proyek	1.717.281.800,00	APBD		5,50%	450.000.000	
2	18	2	02.01		<i>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>240.861.000,00</i>	<i>APBD</i>		<i>100 Persen</i>	<i>450.000.000</i>	
2	18	2	02.02	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Kutai Kartanegara	50 Dokumen	240.861.000,00	APBD		121		450.000.000
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.476.420.800,00	APBD		4 Dokumen	2.050.000.000,00	
2	18	2	02.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	213.793.800,00	APBD		1 dokumen		250.000.000,00
2	18	2	02.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	1.262.627.000,00	APBD		3 Dokumen		1.800.000.000,00
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Kab. Kutai Kartanegara	200 Investor	1.098.959.200,00	APBD		83%	1.050.000.000,00	
2	18	3	02.01		<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Investor (PMA/PMDN)</i>	<i>Kab. Kutai Kartanegara</i>	<i>200 Investor</i>	<i>1.098.959.200,00</i>	<i>APBD</i>		<i>5</i>	<i>1.050.000.000,00</i>	

2	18	3	02.01	0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	4 Dokumen	700.591.400,00	APBD		5	750.000.000,00
2	18	3	02.01	0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	398.367.800,00	APBD		2	300.000.000,00
2	18	4			<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Penerbitan Izin</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>12500 Izin</i>	<i>846.643.775,00</i>	APBD		<i>95,69 Nilai</i>	<i>1.300.000.000,00</i>
2	18	4	02.01		<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>89,52 Nilai</i>	<i>846.643.775,00</i>	APBD		<i>100 Persen</i>	<i>1.300.000.000,00</i>
2	18	4	02.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara		-	APBD		5 Pelaku Usaha	100.000.000
2	18	4	02.01	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	100 Kegiatan Usaha	260.747.800,00	APBD		1082 Pelaku Usaha	400.000.000

2	18	4	02.01	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	250 Kegiatan Usaha	230.627.550,00	APBD		1082 Pelaku Usaha	300.000.000
2	18	4	02.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Kutai Kartanegara	350 Pelaku Usaha	355.268.425,00	APBD		1149 Kegiatan Usaha	500.000.000
2	18	5			<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Pen�akan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>0 persen</i>	<i>619.102.773,00</i>	APBD		79 Persen	<i>750.000.000</i>
2	18	5	02.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Dearah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengendalian PMA / PMDN</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>424 Pelaku Usaha/kegiatan Usaha</i>	<i>619.102.773,00</i>	APBD		100 Persen	<i>750.000.000</i>
2	18	5	02.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kutai Kartanegara	60 Kegiatan Usaha	90.847.800,00	APBD		61 Kegiatan Usaha	-

2	18	5	02.01	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implemtasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Kutai Kartanegara	400 Pelaku Usaha	348.256.200,00	APBD		463 Pelaku Usaha	450.000.000
2	18	5	02.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Dilapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Kutai Kartanegara	24 Kegiatan Usaha	179.998.773,00	APBD		33 Kegiatan Usaha	300.000.000
2	18	6			<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Aplikasi</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>3 Aplikasi</i>	<i>511.315.200,00</i>	APBD		100 Persen	<i>1.000.000,00</i>
2	18	6	02.01		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Aplikasi</i>	Kab. Kutai Kartanegara	<i>3 Aplikasi</i>	<i>511.315.200,00</i>	APBD		10 Dokumen	<i>1.000.000,00</i>
2	18	6	02.01	0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Dokumen	511.315.200,00	APBD		10 Dokumen	1.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wujud komitmen organisasi dalam menyesuaikan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan daerah dengan dinamika nasional serta kondisi fiskal yang berkembang. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman teknokratis dan operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP di tengah kebijakan refocusing nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta kebijakan pengurangan transfer daerah sebesar 50 persen yang berimplikasi pada rasionalisasi dan efisiensi belanja daerah.

Melalui Renja Perubahan ini, DPMPTSP memastikan agar seluruh program dan kegiatan tetap selaras dengan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026* dan *Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2021–2026*, khususnya dalam mendukung dua misi utama daerah, yaitu memperkuat birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani, serta meningkatkan daya saing ekonomi berbasis investasi produktif. Penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip *good governance*, efisiensi anggaran, serta orientasi hasil (outcome-based budgeting).

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hingga triwulan ketiga, capaian fisik sebesar 53,31% dan keuangan sebesar 56,99% menjadi dasar utama dalam melakukan koreksi dan penyesuaian sasaran kinerja. Langkah-langkah perbaikan dilakukan melalui penguatan digitalisasi layanan perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyusunan *Peta Potensi Investasi Daerah* berbasis *Investment Project Ready to Offer (IPRO)*, serta penerapan *Sertifikasi ISO 27001* dan *ISO 37001* guna memperkuat integritas dan

transparansi lembaga. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan investor terhadap Kutai Kartanegara sebagai wilayah investasi unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Dari aspek pendanaan, Renja Perubahan Tahun 2025 mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan mengalihkan belanja non-produktif menuju kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan realisasi investasi dan kepuasan masyarakat. Struktur anggaran diarahkan untuk memperkuat program prioritas, antara lain:

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,**
2. **Program Pelayanan Penanaman Modal,**
3. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,**
4. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta**
5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Kelima program tersebut menjadi tulang punggung strategi DPMPTSP dalam menjaga kesinambungan pembangunan, mendorong pertumbuhan investasi daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan transparan.

Secara strategis, Renja Perubahan 2025 juga memperkuat sinergi lintas sektor dan keterpaduan kebijakan antar-perangkat daerah. Implementasi pendekatan kolaboratif antara DPMPTSP dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UMKM, serta sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan menjadi langkah nyata dalam mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi dan pemerataan investasi antarwilayah. Pendekatan ini sekaligus menjamin agar arah pembangunan tetap sejalan dengan kebijakan prioritas nasional dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta peningkatan daya saing regional Kalimantan Timur.

Pada akhirnya, dokumen *Renja Perubahan Tahun 2025* ini diharapkan menjadi acuan yang komprehensif, adaptif, dan implementatif bagi seluruh pelaksana kegiatan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Renja Perubahan ini diharapkan dapat mencapai sasaran kinerja secara optimal, meningkatkan realisasi investasi daerah, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi Kabupaten Kutai Kartanegara:

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Tenggarong, Agustus 2025
Kepala,

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu

